BAB II

GAMBARAN UMUM PT. POS INDONESIA (PERSERO)

2.1 Sejarah dan Perkembangan PT. Pos Indonesia (Persero)

Dinas pos sudah berdiri dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu sejak masa penjajahan. Perkembangan ini tidak terlepas dari masa penjajahan yang telah dialami oleh Bangsa Indonesia.

Pengklasifikasian perkembangan dinas pos adalah sebagai berikut :

1. ***Masa VOC (1700 – 1808)***

Kedatangan Bangsa – bangsa Eropa pada Abad ke 15 Masehi, yang menandai babak baru sejarah pos di Indonesia. Awalnya adalah kedatangan kapal – kapal laut Belanda dibawah pimpinan Cornelius de Houtman pada tahun 1596. Pada masa ini pengiriman surat hanya dilakukan melalui jalan laut dengan menggunakan perahu yang jadwal pelayarannya berlangsung tidak pasti. Kantor pertama didirikan di Batavia tanggal 26 Agustus 1746 oleh Gubernur Jenderal G. W. Baron Van Imhoff, dengan tujuan menjamin keamanan surat – surat penduduk. Barulah pada tahun 1754 pengiriman surat menjadi teratur, yaitu dua minggu sekali melalui jalan darat. Keadaan ini terus berlangsung selama Bataafche Republiek berkuasa (1800 – 1808).

2. ***Masa Pemerintahan Daendels (1808 – 1811)***

Pada masa ini, Daendels mengeluarkan peraturan – peraturan tenang pos dan membagi Pulau Jawa dalam beberapa distrik, yaitu Banten, Batavia, Semarang,

Surabaya. Setiap distrik di kepalai oleh seorang Commisaris der Wegen en Posterijn yang menempati sebuah General Post Kantoor (kantor pos wilayah) dan membawahi beberapa Profekturan (kantor pos kecil) pengantaran surat dilakukan oleh seorang Postillons (tukang pos berkuda).

3. ***Masa Pemerintahan Raffles (1811 – 1816)***

Pada masa ini Raffles mengeluarkan peraturan mengenai biaya porto untuk surat kabar dab barang cetakan (Regulation for The Post Eshtablishment on The Island of Java).

4. ***Masa Pemerintahan Belanda (1816 – 1942) dan Masa Pendudukan Jepang (1942 – 1945)***

Pada masa pemerintahan Belanda, pengangkutan pos dimulai dengan mempergunakan kereta api Ekpress malam Batavia – Surabaya (1936). Peristiwa penting yang terjadi itu adalah perubahan bentuk usaha Dinas Pos menjadi Jawatan (1864). Pada tahun 1875, Dinas Pos digabungkan dengan Dinas Telegraf dengan nama Post en Telegraf Dienst tang berada di bawah Departement der Burgerlijkke Openbae Werkn (Departemen Pekerjaan Umum). Pada tahun 1884 jawatan telepon bergabung dengan jawatan Pos dan Telegraf yang kemudian dikenal dengan nama Post Telegraaf en Telefoondienst (PTT). Sejalan dengan perkembangan zaman, Status Jawatan PTT diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Postel berdasarkan ordinasi tanggal 28 Desember 1931.

5. ***Masa Kemerdekaan Hingga Saat Ini***

Pada kurun waktu 1945 – 1950 situasi politik di Indonesia penuh dengan pergolakan dalam rangka merebut kedaulatan dari pendudukan Jepang dan Agresi

Milirer Belanda. Situasi ini tentu saja berpengaruh terhadap dinas pos yang ditandai dengan pemindahan perangkat komunikasi, pembumi-hangusan sarana – sarana fisik pos dan terganggunya sarana perhubungan pos dan telegraf.

Setelah situasi membaik, tepatnya pada tanggal 6 Juli 1965 PN Postel dipecah menjadi PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965.
Berdasarkan Undang – Undang No. 9 tahun 1969 menetapkan status BUMN menjadi Perjan, Perum, Persero maka status PN Pos dan Giro diubah menjadi perusahaan umum (Perum) Pos dan Giro dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1978.

Perum Pos dan Giro mempunyai yugas pokok mengusahakan dan mengembangkan pelayanan dalam bidang lalu lintas berita, informasi tertulis, barang dan uang untuk menunjang kelancaran hubungann masyarakat dan menunjang terlaksananya pembangunan nasional. Maka tanggal 27 Februari 1995 Perum Pos dan Giro berubah menjadi PT. Pos Indonesia (PERSERO).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1995 dan disyahkan tanggal 20 Juni 1995.

2.2 Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia (Persero)

Dalam suatu organisasi di berbagai instansi, baik itu di instansi besar maupun kecil, harus ada kerja sama antara pimpinan dengan bawahan juga antara sesama karyawan. Dalam hal ini masing-masing pihak telah diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mengerjakan pekerjaannya. Hal ini

dikarenakan dalam suatu instansi terutama instansi besar, seorang pemimpin tidak mungkin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang semakin kompleks sendirian. Agar tidak terjadi kekacauan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka perlu dibuat suatu struktur organisasi yang menyatakan fungsi serta saluran hubungan, pengawasan dan wewenang pegawai dalam suatu instansi, karena dengan melihat bagannya maka segala wewenang dan tanggung jawab para pejabat dan pegawai akan dapat dilihat dengan jelas dan mudah dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan struktur statis dan kumpulan orang yang bekerja sama dengan berlandaskan planning / tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi dan tata kerja PT. Pos Indonesia (PERSERO) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) no. 189 / DIRUT / 1995 tanggal 18 Oktober 1995 tentang organisasi dan tata kerja PT. Pos Indonesia (Persero) dan no. 209 / DIRUT / 1995 tentang organisasi tata kerja wilayah usaha pos tanggal 7 November 1995. Organisasi PT Pos Indonesia (PERSERO) disusun dalam tiga tingkatan, yaitu Tingkat Pusat, Tingkat Daerah dan Tingkat Unit Pelaksana Teknis. Adapun mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada PT. Pos Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut :

2.3 Deskripsi Jabatan PT. Pos Indonesia (Persero)

Adapun struktur jabatan yang ada di Pos Indonesia (Persero) terdiri atas :

A.Organisasi Tingkat Pusat terdiri atas :

I. Direksi

1. Direktorat Operasi
2. Direktorat SDM
3. Direktorat Keungan
4. Direktorat Peencanaan, Teknik, dan Sarana
5. Satuan Pengwasan Intern
6. Sekretariat Perusahaan
7. Pusat Perencanaan dan Penelitian Terapan
8. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

II. Pimpinan

Pimpinan PT. Pos Indonesia (Persero) adalah Direksi PT. Pos Indonesia sebagai satu kesatuan yang terdiri dari :

1. Direktur Utama selaku Ketua
2. Direktur Operasi selaku Anggota
3. Direktur Pemasaran selaku Anggota
4. Direksi SDM dan Sarana selaku Anggota
5. Direktur Keuangan selaku Anggota

B.Tingkat Wilayah

PT. Pos Indonesia membagi wilayah kerjanya menjadi 11 wilayah usaha pos (Wilpos) yang terdiri dari :

1. Wilpos I Medan

2. Wilpos II Padang
3. Wilpos III Palembang
4. Wilpos IV Jakarta
5. Wilpos V Bandung
6. Wilpos VI Semarang
7. Wilpos VII Surabaya
8. Wilpos VIII Denpasar
9. Wilpos IX Banjar Baru
10. Wilpos X Makasar
11. Wilpos XI Jayapura

2.4 Aspek Kegiatan PT. Pos Indonesia (Persero)

Secara garis besar aspek kegiatan PT. Pos Indonesia terdiri dari Aspek Pokok (*care business*) dan usaha penunjang (*non care business*).

Berdasarkan sifat media penyimpanannya, usaha pokok meliputu :

1. Layanan Fisik
    a. Layanan Surat Pos
    b. Layanan Paket Pos
    c. Layanan Keuangan
    d. Layanan Filateli
2. Layanan Elektronik dengan Wasantara Net sebagai tulang punggungnya untuk menjadikan fasilitas – fasilitas :

a) Internet :

Surat Elektronik (e-mail)

Kotak Pos Elektronik

Warung Pos Internet (Warposnet)

Internet untuk jaringan korforasi

b) Elektronik Data Interchange (EDI) untuk membangun komunikasi antar berbagai data, antara lain : Eko-net. Sosio-net, Agro-net, Sekolah Terbuka, Perpustakaan Terbuka, dan sebagainya.

c) Hybride Mail :

Surat Bisnis Elektronik

Direct Mail

Weselpos Elektronik

Advantensi Elektronik

3.Aspek Penunjang, yaitu : Usaha keagenan, antara lain dapat memberikan layanan:

Penyewaan ruang dan tempat

Bank Pos

Belanja lewat Pos

Berbagai layanan keagenan